

Payakumbuh: Kajian Arkeologi Perkotaan di Keresidenan Pantai Barat Sumatra ***Payakumbuh : Urban Archaeology Study on Sumatra's Westkust Residency***

Dwi Kurnia Sandy
 Balakala Bhumi Apsara
 Jalan Manding-Imogiri, Sumberagung, Jetis, Bantul, Yogyakarta
 Pos-el: dksandy22@gmail.com

Naskah diterima: 4 Januari 2025 - Revisi terakhir: 26 Mei 2025

Disetujui terbit: 30 Mei 2025 - Terbit: 13 Juni 2025

Abstract

Payakumbuh is one of the colonial cities developed by the Netherland East Indies Government in the Residency Sumatra's Westkust. This research aims to explain the history of Payakumbuh's development since it was established as the Capital of Afdeeling Limapuluh Kota until the influence of the colonial urban planning concept on its modern spatial development. The method used in this research is a desk study, with data collection from maps, photos, newspapers, and related documents from colonial era, which are then verified through field surveys. The results revealed five main types of infrastructure built in Payakumbuh during the colonial period, reflecting the city's function as an administrative and trading centre. The urban planning of Payakumbuh at that time was divided into three main zones: the core zone that functioned as the centre of government and trade, the buffer zone that included community service facilities and the local community settlement zone located on the outskirts of the city. The current development of Payakumbuh shows spatial adaptation that retains some colonial elements, but with functions that have been adjusted to modern needs. This research concludes that the Netherland East Indies colonial concept of urban planning has a significant influence on the development of Payakumbuh City until today.

Keywords: *Payakumbuh; Colonial City; Afdeeling Limapulu Kota*

Abstrak

Payakumbuh merupakan salah satu kota kolonial yang dikembangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Keresidenan Pantai Barat Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan Payakumbuh sejak ditetapkan sebagai Ibu Kota *Afdeeling* Limapuluh Kota hingga pengaruh konsep tata kota kolonial terhadap perkembangan tata ruang modernnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan pengumpulan data dari peta, foto, koran, dan dokumen terkait, yang kemudian diverifikasi melalui survei lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan lima jenis sarana perkotaan utama yang dibangun di Payakumbuh pada masa kolonial, mencerminkan fungsi kota sebagai pusat administratif dan perekonomian. Ditinjau dari konsep dimensi urbanisme, di Kota Payakumbuh pada masa Pemerintah Hindia Belanda dapat dilihat terjadinya pertumbuhan fisik kota yang selaras dengan peningkatan aktivitas ekonomi, munculnya keragaman sosial di tengah masyarakat, fungsi administratif kota sebagai perwujudan pengaruh politik kolonial, serta struktur tata ruang kota yang terbagi ke dalam tiga zona utama—yakni pusat kota, zona penyangga, dan kawasan permukiman tradisional.

Kata kunci: Payakumbuh; Kota Kolonial; *Afdeeling* Limapuluh Kota

PENDAHULUAN

Istilah "kota" dan "permukiman" sering kali digunakan secara bergantian, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Dalam konteks kolonial, banyak pihak cenderung mengidentifikasi permukiman kolonial sebagai kota. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada aspek institusional. Permukiman umumnya merujuk pada komunitas yang terbentuk berdasarkan kesamaan etnis, asal-usul, atau ikatan sosial tertentu, kemudian mendiami suatu wilayah tanpa adanya pengakuan formal dari institusi resmi. Sebaliknya, kota merupakan entitas yang terbentuk dari gabungan beberapa permukiman dan memiliki status legal yang diakui secara resmi, baik melalui undang-undang maupun peraturan administratif. Berdasarkan data yang dikumpulkan penulis, di Hindia Belanda, status kota administrasi ditetapkan melalui *Staatsblad van Nederlandsch-Indië*. Salah satu contoh penerapan institusionalisasi permukiman oleh Pemerintah Hindia Belanda dapat dijumpai pada Kota Payakumbuh.

Payakumbuh (*Pajakoemboeh*) merupakan salah satu kota yang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Barat (Gambar 1). Kota ini merupakan daerah administratif yang dirancang oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi pusat pemerintahan. Sama halnya yang dilakukan di Pulau Jawa, Pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan daerah-daerah tradisional untuk dijadikan sebagai kota-kota kolonial. Pada daerah-daerah tradisional tersebut, Pemerintah Hindia Belanda menambahkan berbagai sarana perkotaan untuk membuat para pegawai pemerintahan dan orang Eropa nyaman untuk tinggal dan bekerja di daerah tersebut. Mereka menambahkan berbagai sarana perkotaan seperti sarana perkantoran, pasar, perumahan, rumah sakit, sekolah, sarana olahraga, pemakaman dan sarana perkotaan lainnya (Basundoro 2016). Payakumbuh pada masa tersebut menjadi salah satu wilayah yang dibangun berbagai sarana perkotaan. Sebagai bagian dari Keresidenan *Sumatra's Westkust* (Pantai Barat Sumatra), Payakumbuh dapat dikatakan sebagai kota kolonial.

Pembangunan sarana perkotaan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap Payakumbuh, dapat kita tinjau melalui perspektif kajian Arkeologi Perkotaan. Pendekatan arkeologi perkotaan dapat diartikan sebagai sebuah studi arkeologi yang melihat hubungan antara budaya material, tingkah laku, dan kegiatan manusia di dalam suatu kota, pola keruangan, perbedaan kompleks permukiman dan material serta

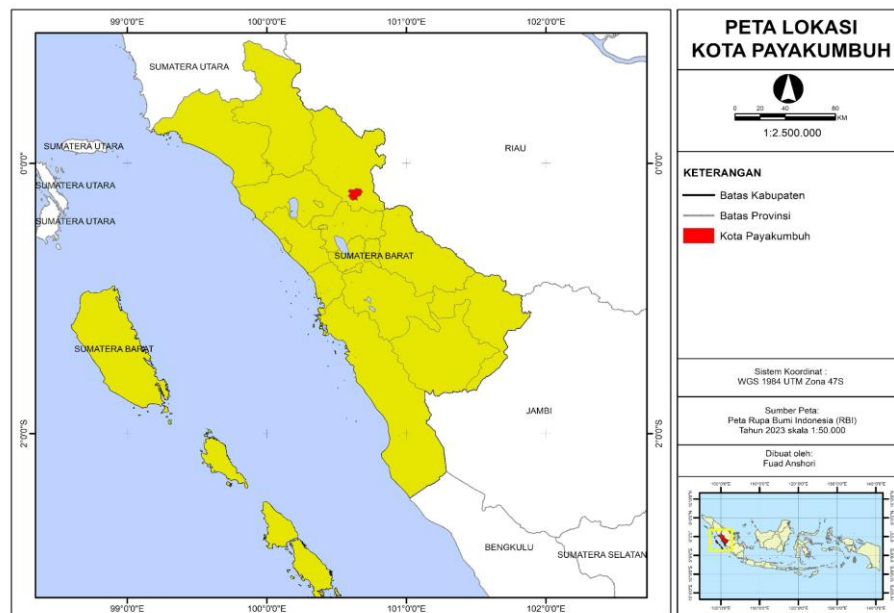
perubahan sosial di masa lalu (Marzuki, 2020). Arkeologi perkotaan telah menjadi fenomena aktual dalam penelitian ilmiah modern karena membentuk pengetahuan yang unik tentang sejarah awal pembentukan kota dan perkembangannya (Saibert, 2016).

Arkeologi Perkotaan tidak hanya mengamati wujud fisik tinggalan arkeologinya, namun juga fungsi serta transformasinya secara spasial dan temporal. Pendekatan ini mencari hubungan antara bentuk *tangible* kawasan dengan bentuk *intangible*-nya terkait dengan kehidupan manusia di kawasan perkotaan. Dalam pendekatan Arkeologi Perkotaan, pengamatan terhadap kota dapat dilakukan melalui tiga tingkatan analisis. Pertama, pengamatan dalam lingkup sempit yang berfokus pada artefak-artefak portabel yang berkaitan langsung dengan kehidupan perkotaan, seperti tiang lampu jalan, penunjuk arah, pembatas jalan, dan elemen sejenis lainnya. Kedua, pengamatan dalam lingkup yang lebih luas mencakup kajian terhadap bentuk bangunan dan struktur penunjang kota, termasuk bangunan dengan fungsi tertentu seperti rumah tinggal, kantor, serta sarana perkotaan seperti jembatan, saluran air, dan bendungan. Ketiga, pengamatan pada skala kawasan kota secara keseluruhan, yang meninjau kota sebagai suatu kesatuan spasial yang tersusun dari kumpulan bangunan dan struktur dengan fungsi beragam. Pada tingkatan ini, dapat dikenali adanya pola spasial tertentu yang mencerminkan perencanaan wilayah, seperti zona militer, kawasan perkantoran, area pendidikan, dan fungsi-fungsi lainnya (Pradnyawan, 2019).

Melalui pendekatan arkeologi perkotaan, tulisan ini bertujuan menjelaskan sejarah perkembangan Payakumbuh sejak ditetapkan sebagai Ibu Kota *Afdeeling* Limapuluh Kota hingga pengaruh konsep tata kota kolonial terhadap perkembangan tata ruang modernnya. Selama ini, kajian terhadap kota-kota kolonial di Keresidenan Pantai Barat Sumatra masih jarang dilakukan. Hal yang lebih banyak dilakukan yaitu pendataan tinggalan-tinggalan arkeologi.

Pada kasus Payakumbuh, telah banyak bukti arkeologis yang telah rusak atau hilang, sehingga dikhawatirkan informasi mengenai perkembangan kota ini tidak akan tersampaikan kepada generasi mendatang. Hingga kini, belum ada penelitian mendalam yang secara khusus membahas perkembangan tata kota Payakumbuh pada masa Pemerintahan Hindia Belanda terutama pada area pusat kota. Penelitian arkeologi terkait Payakumbuh dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018, melalui kegiatan inventarisasi potensi objek cagar budaya. Penelitian

tersebut sebatas memaparkan komponen-komponen kota yang dibangun pada masa kolonial beserta kondisi terkini sarana perkotaan tersebut. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi langkah awal untuk kajian lebih lanjut mengenai sejarah dan pelestarian warisan budaya Kota Payakumbuh, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan tentang kota kolonial di Indonesia.



Gambar 1. Peta Lokasi Kota Payakumbuh (Dibuat Fuad Anshori, 2024).

METODE

Penelitian ini berfokus pada area pusat kota Payakumbuh ketika masih menjadi ibukota *Afdeeling* Limapuluh Kota. Tahapan pertama dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melakukan studi pustaka (*desk study*) dan survei lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur yang mencakup berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi peta, foto, koran, dan buku, semuanya merupakan terbitan dari masa Pemerintah Hindia Belanda yang menyediakan informasi mengenai perkembangan sosial di Kota Payakumbuh pada periode tersebut.

Tahapan selanjutnya, dilakukan proses *georeference* pada Peta *Sumatra: A Phenomen in 1891-1893*. Setelah *georeference* selesai, peta hasil olahan dimasukkan ke dalam aplikasi *Avenza Maps* untuk mempermudah integrasi dengan data lapangan. Survei lapangan kemudian dilakukan dengan merujuk pada peta tersebut. Hasil survei

mengungkap beberapa bangunan yang belum tercatat dalam laporan BPCB 2018. Namun, melalui informasi dari peta dan verifikasi langsung dengan masyarakat setempat, bangunan-bangunan tersebut berhasil diidentifikasi sebagai bagian dari Sarana perkotaan yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda di Payakumbuh. Selain itu, juga dibahas beberapa sarana perkotaan yang dibangun untuk tujuan pemerintahan tetapi didirikan setelah pembuatan peta tersebut.

Dalam pendekatan Arkeologi Perkotaan, terdapat sejumlah aspek yang dapat dianalisis untuk memahami dinamika kota dan permukiman. Smith (2020) merumuskan pendekatan ini ke dalam sebuah kerangka yang disebut sebagai "dimensi urbanisme", yakni seperangkat variabel utama yang saling berkaitan dan digunakan secara terpadu dalam analisis arkeologis terhadap wilayah perkotaan. Konsep ini terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, dimensi utama yang mencakup ukuran kota (meliputi populasi, luas wilayah, dan tingkat kepadatan), fungsi perkotaan (berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan), serta kehidupan dan dinamika sosial masyarakat kota. Kedua, dimensi sekunder yang meliputi aspek bentuk fisik kota (tata ruang dan arsitektur), makna simbolis dari ruang perkotaan (simbolisme dan representasi budaya), serta proses pertumbuhan kota yang mencakup ekspansi wilayah dan perkembangan aktivitas ekonomi.

Proses analisis dimulai dengan kajian terhadap peta untuk mengidentifikasi sarana perkotaan yang pernah dibangun di Payakumbuh. Informasi ini kemudian dibandingkan dengan temuan dari sumber-sumber lain seperti buku, koran, dan foto-foto yang tersedia. Metode komparatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali perubahan dan perkembangan yang terjadi dari masa kolonial hingga kondisi saat ini di Payakumbuh. Dalam tulisan ini, dilakukan klasifikasi jenis sarana perkotaan untuk mempermudah pemahaman tentang tata ruang Kota Payakumbuh dan pembagian keruangan kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan sistem pemerintahan di *Sumatra's Westkust* dan Peran Strategis Kota Payakumbuh

Melihat peran Payakumbuh sebagai kota pemerintahan masa Pemerintahan Hindia Belanda, kita perlu untuk melihat perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di Sumatra Barat. Pada 31 Desember 1799, VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*)

resmi dinyatakan bangkrut, menandai berakhirnya era dominasi perusahaan dagang terbesar di Nusantara. Seluruh wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali VOC kemudian diserahkan kepada Kerajaan Belanda, mengawali masa pemerintahan Hindia Belanda. Perubahan kekuasaan ini membawa dampak besar terhadap sistem pemerintahan di berbagai daerah, termasuk wilayah Payakumbuh. Transformasi tersebut tidak hanya mengubah pola administrasi, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik di wilayah-wilayah tersebut.

Ketika masih dikuasai VOC, wilayah yang saat ini menjadi bagian dari Provinsi Sumatra Barat tergabung di dalam wilayah *Hoofdcomptoir van Sumatra's Westkust*. Pada saat itu, wilayah administratif tersebut hanya terdiri dari beberapa kota pesisir dan sekitarnya. Setelah VOC bubar, Inggris mengambil alih wilayah *Hoofdcomptoir van Sumatra's Westkust* hingga tahun 1819. Setelahnya Inggris menyerahkan wilayah tersebut kepada Pemerintah Hindia Belanda. Pada 1825 Pemerintah Hindia Belanda membentuk wilayah administratif setingkat residen bernama *Residentie Padang*. Pada tahun 1837, statusnya dinaikkan menjadi *gouvernement* dan wilayah ini disebut *Gouvernement Sumatra's Westkust* (Asnan 2002).

Di dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor 1863 nomor 45* terdapat informasi mengenai gaji para kepala suku /penghulu (*larashoofd*) yang merupakan pemimpin tertinggi di nagari/desa di wilayah *Sumatra's Westkust*. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 18 April 1863 No. 25, diketahui adanya pembagian wilayah administratif baru pada *Gouvernement Sumatra's Westkust*. Wilayah ini terbagi menjadi tiga *residentie*, yaitu Padang, *Padangsche Bovenlanden*, dan *Tapanulie*. Pada *Residentie Padangsche Bovenlanden*, terdapat tiga *afdeeling*, yaitu *Afdeeling Tanah Datar*, *Afdeeling Agam*, dan *Afdeeling Limapuluh Kota*. Pada masa ini, nama Payakumbuh belum muncul, karena ibu kota *Afdeeling Limapuluh Kota* saat itu masih bernama Distrik Limapuluh Kota (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1863*). Namun, wilayah yang disebut Distrik Limapuluh Kota inilah yang kemudian hari berubah nama menjadi Payakumbuh.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 10 April 1864 No. 5 di dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor 1863 nomor 56*, disetujui penambahan kantor kas cabang (*onderkassen*) di wilayah *Sumatra's Westkust*. Selain kantor kas utama (*hoofdkassen*) yang berada di Padang, Fort de Kock (Bukittinggi),

Pada 1913 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 9 April 1913 no. 28 di dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor 1913* nomor 321 dilakukan penghapusan Keresidenan *Padangsche Bovenlanden* dan menetapkan pembagian *Gouvernement Sumatra's Westkust* menjadi delapan *afdeeling*. Kedelapan *afdeeling* tersebut yaitu: *Afdeeling* Padang, *Afdeeling* Zuid Westkust, *Afdeeling* Batipuh-Pariaman, *Afdeeling* Agam, *Afdeeling* Lubuk Sikaping, *Afdeeling* Limapuluh Kota, *Afdeeling* Tanah Datar, dan *Afdeeling* Solok. Keputusan tersebut mengubah struktur pemerintahan di wilayah tersebut sehingga hanya terdiri dari *gouvernement*, *afdeeling*, *onderafdeeling*, dan distrik. Meskipun posisi residen dihapuskan, jabatan asisten residen tetap digunakan. Khusus pada *Afdeeling* Limapuluh Kota, pusat pemerintahan dan lokasi berkantor asisten residen berada di Payakumbuh (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1913).

Pada tahun 1935, dilakukan reorganisasi kembali pemerintahan Keresidenan *Sumatra's Westkust*. Hal ini diatur dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1935 nomor 450, yang memuat Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 10 September 1935 No. 26 tentang penetapan kembali pembagian administratif Keresidenan *Sumatra's Westkust* dan susunan kepegawaian pemerintahan dalam negeri di wilayah tersebut. Berdasarkan keputusan tersebut, wilayah *Keresidenan Sumatra's Westkust* dibagi menjadi lima *afdeeling*, yaitu *Afdeeling* Pesisir Bagian Selatan, *Afdeeling* Tanah Datar, *Afdeeling* Agam, *Afdeeling* Solok, dan *Afdeeling* Limapuluh Kota. Keputusan ini juga menetapkan kembali Payakumbuh sebagai ibu kota sekaligus tempat tinggal Asisten Residen untuk *Afdeeling* Limapuluh Kota (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1935).

Setelah tentara Jepang menduduki Sumatra Barat, *Gouvernement van Sumatra's Westkust* dibubarkan, dan pada 9 Agustus 1942, wilayah ini berubah menjadi *Sumatora Nishi Kaigun Shu*, setingkat keresidenan dengan ibu kota di Padang. Struktur pemerintahan di bawah *Sumatora Nishi Kaigun Shu* tetap mengikuti pembagian administratif yang telah ditetapkan pada era *Gouvernement van Sumatra's Westkust* tahun 1935. Pasca kemerdekaan, wilayah ini mengalami perubahan sistem pemerintahan. Pada 8 Oktober 1945, melalui *besluit* No. R.I/I, Moh. Syafei membentuk delapan *luhak* di keresidenan Sumatra Barat, menggantikan sistem *afdeeling* (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2019). Wilayah Limapuluh Kota, yang sebelumnya berstatus *afdeeling*, diubah menjadi *Luhak* Limapuluh Kota dengan ibu kota di Kawedanan Payakumbuh.

Seiring waktu, sistem *luhak* dihapus dan digantikan dengan sistem Kabupaten dan Kota. Pada 17 Desember 1970, setelah hampir satu abad menjadi bagian dari Limapuluh Kota, Payakumbuh memisahkan diri dan menjadi kota otonom hingga saat ini.

Tinggalan Arkeologi di Payakumbuh

Sejarah perkembangan Payakumbuh dapat ditelusuri melalui berbagai tinggalan arkeologi yang masih ada hingga saat ini. Tinggalan tersebut dapat dilihat dengan keberadaan bangunan-bangunan yang pada masa Pemerintahan Hindia Belanda difungsikan sebagai fasilitas perkotaan. Bangunan-bangunan tersebut difungsikan sebagai perkantoran, rumah tinggal, sarana transportasi, sekolah, keagamaan, perdagangan dan hiburan. Dijadikannya Payakumbuh sebagai ibukota *Afdeeling* Limapuluh Kota dari masa ke masa telah mendorong kebutuhan akan berbagai fasilitas pendukung guna menunjang kelancaran pemerintahan. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Peta *Sumatra: A Phenomen in 1891-1893* (Topographisch Bureau Batavia 1894), terdapat 14 fasilitas yang difungsikan untuk mendukung jalannya roda pemerintahan. Sarana perkotaan pendukung tersebut dirangkum sebagai berikut (Tabel 1) (Gambar 3):

Tabel 1. Sarana perkotaan di Payakumbuh Sebelum 1894 (Topographisch Bureau Batavia 1894)

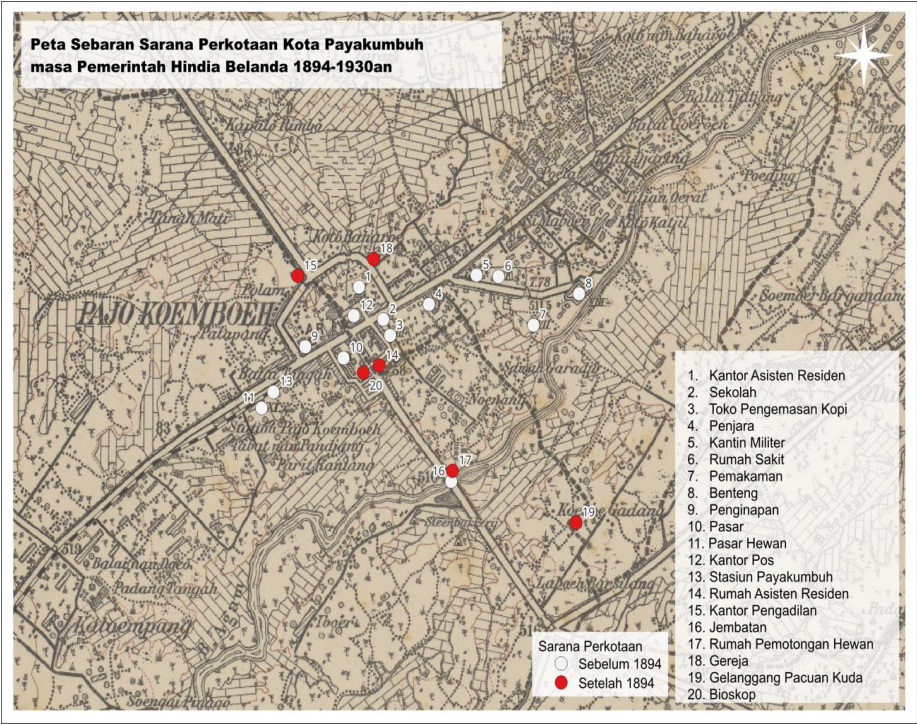
No	Informasi di Peta			Kondisi saat ini
	Kode	Sarana perkotaan	Arti	
1	AR	Standplaats van een Assistant Resident	Tempat Bekerja Asisten Residen	-
2	-	Station Pajakoemboeh	Stasiun Kereta Api Payakumbuh	Ada
3	I	Bureau van de Assistant Resident Tevens post Kantoor	Kantor Asisten Residen dan Kantor Pos	Terawat
4	II	Inladscheeschool	Sekolah Bumiputera	Jadi Bangunan Baru
5	III	Koffiepak Huis	Rumah Pengemasan Kopi	Sudah Hilang
6	IV	Gevangenis	Penjara	Ada
7	V	Militair Cantine	Barak Militer	Sudah Hilang
8	VI	Hospitaal	Rumah Sakit	Sudah Hilang
9	VII	Kerkhof met Monument ophetgraf van den Generaal H. Demmeni	Makam Belanda	Ada Sebagian
10	VIII	Redoute	Benteng Pertahanan	Ada Sebagian
11	IX	Logement	Penginapan	Ada Sebagian
12	X	Pasar	Pasar	Ada
13	XI	Veepasar	Pasar Ternak	Sudah Hilang
14	-	Jembatan	Jembatan	Ada
15	-	Streert Bakkerij	Toko Roti	Sudah Hilang

Sumber: Topographisch Bureau Batavia 1894

Tabel 2. Tambahn Sarana perkotaan Payakumbuh Setelah 1894

No	Nama sarana perkotaan	Kondisi saat ini
1	Bioskop	Sudah Hancur
2	Rumah Asisten Resident	Terawat
3	Rumah Potong Hewan	Terawat
4	Gereja	Terawat
5	Kantor Pengadilan	Terawat
6	Gelanggang Pacuan Kuda	Terawat
7	Gedung Sociate	Tidak Diketahui

Seiring perkembangannya, pertumbuhan kota yang berkelanjutan mendorong kebutuhan akan tambahan sarana perkotaan. Pada awal abad ke-20 hingga sekitar tahun 1930-an, berbagai fasilitas mulai dibangun sebagai respons terhadap kebutuhan kota yang semakin meningkat (Tabel 2). Berbagai kebutuhan sekunder dan tersier, baik untuk pegawai pemerintahan maupun masyarakat lokal, mulai tersedia di Payakumbuh. Sebagai upaya dalam memahami sarana perkotaan yang dibangun di kota ini, dilakukan pembagian area berdasarkan fungsi masing-masing (Gambar 3).



Gambar 3. Sebaran Sarana perkotaan Masa Kolonial di Payakumbuh (Sumber: Topographisch Bureau Batavia 1894, 1, dan diolah oleh Dwi Kurnia Sandy, 2024)

Area pemerintahan dan keamanan menjadi bagian paling penting dalam sebuah kota, terutama sebagai pusat administrasi. Sebagai ibu kota *Afdeeling* Limapuluh Kota,

Payakumbuh memiliki enam sarana perkotaan utama yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda (Gambar 4): (1) kantor asisten residen, (2) rumah asisten residen, (3) benteng, (4) kantin militer, (5) penjara, dan (6) kantor pengadilan. Kantor asisten residen difungsikan sebagai pusat administrasi dan pelaksanaan pemerintahan di Payakumbuh. Salah satu tokoh yang pernah menjabat sebagai Asisten Residen Payakumbuh adalah Van der Meulen, yang memulai tugasnya pada tahun 1932 (Sumatra-bode 1932). Saat ini bangunan tersebut masih terawat dan dimanfaatkan oleh Koramil 01 Payakumbuh. Sementara itu, penjara yang difungsikan sebagai rumah tahanan masih digunakan dan dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan (LP) Payakumbuh. Benteng di Payakumbuh pada awalnya berfungsi tidak hanya sebagai pos pertahanan dan barak tentara, tetapi juga sebagai kediaman asisten residen sebelum abad ke-20 (Schuiling 1889). Meskipun telah mengalami banyak perubahan, beberapa bagian benteng masih menunjukkan jejak keberadaannya. Saat ini, lokasi tersebut difungsikan sebagai Asrama Polisi (AsPol) Bivak Payakumbuh. Memasuki awal abad ke-20, dua Sarana perkotaan tambahan dibangun di area ini, yaitu rumah asisten residen yang kondisinya terawat hingga kini, dan kantor pengadilan yang saat ini kurang terawat (BPCB Sumatera Barat 2018). Sebaliknya, kantin militer tidak lagi ditemukan jejak fisiknya, menunjukkan bahwa bangunan tersebut sudah hilang sepenuhnya.



Gambar 4. Sarana perkotaan Area Pemerintahan dan Keamanan Kota Payakumbuh: A. Penjara, B. Rumah Asisten Residen, C. Kantor Pengadilan, D. Benteng, dan E. Kantor Asisten Residen (Sumber: Dokumen Dwi Kurnia Sandy, 2024)

Area selanjutnya yang dibangun yaitu area layanan masyarakat. Area kenyamanan masyarakat di Payakumbuh mencakup empat komponen utama, yaitu: (1) rumah sakit, (2) sekolah, (3) gereja, dan (4) pemakaman (Gambar 5). Rumah sakit yang

telah ada sejak awal pengembangan Payakumbuh mengalami beberapa perubahan signifikan. Perubahan yang tercatat pada rumah sakit ini adalah adanya penghancuran sebagian bekas bangunan rumah sakit, yang kemudian digantikan dengan pembangunan kantor dewan pengairan (Sumatra-bode 1913). Hingga saat ini, bekas dari rumah sakit ataupun kantor dewan pengairan tersebut masih belum dapat ditemukan. Selain rumah sakit, bangunan sekolah juga mengalami pengembangan. Saat ini, lokasi yang dahulunya merupakan sekolah lama telah menjadi kompleks SMP 1 Payakumbuh, dengan beberapa bangunan yang telah dibangun pada tahun 1946 (BPCB Sumatera Barat 2018).

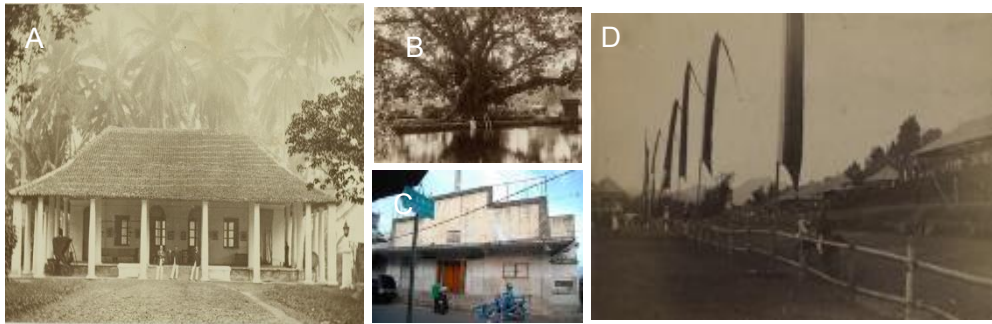
Bangunan yang masih bertahan hingga saat ini dan masih digunakan yaitu bangunan gereja. Gereja Katolik di Payakumbuh didirikan atas inisiatif Pastor P. J. Van Hoof pada tanggal 25 Januari 1933. Selain gereja, ia juga membangun sebuah paviliun atau rumah tinggal untuk pastor yang terletak di sisi utara gereja. Paviliun tersebut selesai lebih awal, pada tanggal 28 Desember 1931. Saat ini, kompleks ini mencakup gereja, paviliun, sekolah dasar (SD), taman kanak-kanak (TK), dan asrama suster, yang seluruhnya dikelola oleh Yayasan Prayoga (BPCB Sumatera Barat 2018).

Area pemakaman orang Eropa juga mengalami perubahan besar. Seluruh makam di area ini dihancurkan untuk membuka lahan bagi pembangunan sekolah. Kini, satu-satunya yang tersisa adalah monumen makam Mayor Jenderal J.L.J.H. Pel Demmeni. Ia adalah seorang yang diangkat menjadi komandan militer di Aceh pada 2 Juni 1883 dan gubernur wilayah Aceh pada 1884 (Bataviaasch nieuwsblad 1886). Pel Demmeni sejak November 1886 melepas jabatannya di Aceh untuk memulihkan kesehatannya dan menghabiskan waktu di Payakumbuh dan meninggal pada Desember 1886 (Opregte Haarlemsche Courant 1887). Selain dikenal sebagai gubernur wilayah Aceh dia juga dikenal sebagai ayah dari Jean Demmeni, salah satu fotografer terkenal di Hindia Belanda.



Gambar 5. Sarana perkotaan Area Layanan Masyarakat Kota Payakumbuh: A. Monumen Darmin, dan B. Gereja (Sumber: Dokumen Dwi Kurnia Sandy, 2024)

Area ketiga adalah hiburan dengan komponen kota pada area ini terdiri dari (1) Gedung *Sociëteit*, (2) Gelanggang Pacuan Kuda, (3) dan Bioskop (Gambar 6). Hingga saat ini, lokasi dan bukti arkeologis dari Gedung *Sociëteit* Payakumbuh belum ditemukan. Satu-satunya informasi mengenai bangunan tersebut dari arsip foto KITLV 805635 tahun 1887. Kondisi berbeda jauh dengan Gelanggang Pacuan Kuda yang hingga saat ini masih ditemukan. Akan tetapi bangunan pendukung seperti di dalam foto KITLV 91521 tahun 1887 sudah hilang dan digantikan dengan tribun baru. Bagi masyarakat lokal, pacuan kuda merupakan menjadi budaya hingga saat ini. Pada tahun 1902, H. Cramwinckel, letnan artileri di *Fort de Koek* (Bukittinggi) dan Ch. Th. H. de Wilde, Kepala depot kuda jantan di Payakumbuh mulai mengajari para kepala suku merawat dan menunggangi kuda-kuda milik mereka. Pelatihan ini diulangi dalam skala yang lebih besar pada tahun 1903 (Wingen 1903, 31). Pada kasus Gedung bioskop telah lama tidak digunakan sejak 1980-an. Saat ini gedung bioskop pertama di Payakumbuh tersebut telah dihancurkan. Selain ketiga lokasi tersebut, terdapat dua lokasi hiburan yang berada di sekitar Kota Payakumbuh yaitu (1) Harau dan (2) Kolam Renang Batang Tabit. Namun, kedua area tersebut tidak berada di pusat Kota Payakumbuh.



Gambar 6. Sarana perkotaan Area Olahraga dan Hiburan Kota Payakumbuh: A. Gedung Sociate, B. Kolam Renang Batang Tabit tahun 1915 C. Bioskop, D. Gelanggang Pacuan Kuda, (<http://hdl.handle.net/1887.1/item:805635>, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:805264>BPCB, 2018, <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/811320>)

Area selanjutnya yaitu perhubungan yang meliputi (1) stasiun kereta api, (2) Jembatan Ratapan Ibu, (3) penginapan, (4) dan kantor pos (Gambar 7). Pembangunan stasiun kereta api (*SS Pajakoemboeh*) Payakumbuh yang dibangun sebelum tahun 1890 tidak lepas dari masifnya industri kopra di Keresidenan Pantai Barat Sumatera. Sejak 1892, Sumatra Barat menjadi eksportir terbesar Ketika di Hindia Belanda untuk urusan kopra. Mencapai puncaknya pada 1911 dengan berhasil menjadi penyumbang 8-9 persen dari total ekspor Hindia Belanda pada tahun tersebut (Asba 2007). Payakumbuh dijadikan sebagai lokasi pengangkutan kopra dari berbagai wilayah *Afdeeling* Limapuluh Kota. Stasiun Payakumbuh mengangkut hasil kopra beserta hasil bumi lainnya menuju Padang-Pelabuhan Teluk Bayur. Pada 19 Juni 1921, Stasiun Payakumbuh mendapat rute perjalanan baru setelah diresmikannya jalur trem sepanjang 21 Km menuju Limbanang-Suliki ke arah utara (Joustra 1923).

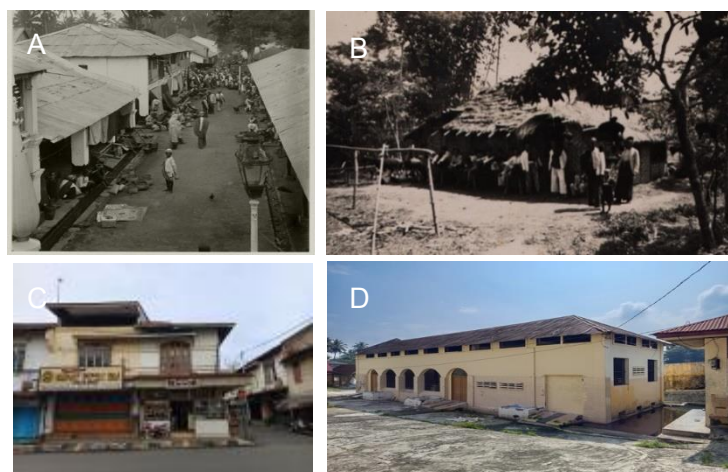
Selain melalui jalur kereta api, wilayah Payakumbuh juga dihubungkan oleh sarana perkotaan jembatan. Pada tahun 1818, sebuah jembatan dibangun untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang dipisahkan oleh aliran Sungai Batang Agam. Hingga awal masa kemerdekaan, jembatan ini menjadi satu-satunya penghubung antara sisi selatan dan utara Kota Payakumbuh (Gambar 7). Jalan yang menghubungkan jembatan tersebut awalnya berupa jalan tanah dengan pembatas di kedua sisinya serta dilengkapi lampu penerangan untuk mempermudah akses pada malam hari (Gambar 7).

Dua komponen kota lainnya, yaitu penginapan dan kantor pos, mengalami nasib yang berbeda. Bangunan penginapan saat ini hanya menyisakan sebagian kecil peninggalan arkeologi, sedangkan kantor pos tidak meninggalkan jejak arkeologis sama sekali. Lokasi kantor pos ini telah dibangun kantor pos baru.



Gambar 7. Sarana perkotaan Area Perhubungan Kota Payakumbuh: A. Stasiun Payakumbuh tahun 1890, dan B. Stasiun Payakumbuhn 2024, C. Kondisi Jalan tahun 1880, D. Jembatan Ratapan Ibu (<http://hdl.handle.net/1887.1/item:706451> Dwi Kurnia Sandy, 2024, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:912145>, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:925025>)

Terakhir adalah area perdagangan, yang terdiri dari tiga komponen utama: (1) Pasar, (2) Pasar Hewan, dan (3) Rumah Potong Hewan (Gambar 8). Sejak awal, wilayah pasar di Payakumbuh telah menjadi kawasan pecinan. Hingga saat ini, banyak bangunan bersejarah di kawasan ini yang masih terjaga dalam kondisi utuh, seperti Bangunan Toko Putra Jaya, Pertokoan Bofet Sianok, Pertokoan Penak Elektronik, Toko HM, dan lainnya. Sementara itu, Rumah Potong Hewan masih terjaga dan tetap difungsikan untuk kegiatan pemotongan hewan. Berbeda dengan Pasar Hewan, yang lokasinya tercatat dalam Peta *Sumatra: A Phenomen in 1891-1893*, sudah tidak menyisakan tinggalan arkeologis. Bekas area Pasar Hewan kini telah berubah menjadi bangunan pertokoan modern.



Gambar 8. Sarana perkotaan Area Perdagangan Kota Payakumbuh: A. Pasar tahun 1930, dan B. Pasar Hewan tahun 1939, C. Pasar saat ini, D. Rumah Potong Hewan. Saat ini (Sumber: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:891506>, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:891506> Dwi Kurnia Sandy, 2024)

Dimensi Urbanisme Payakumbuh pada Masa Pemerintah Hindia Belanda.

Pembentukan keruangan di Kota Payakumbuh pada masa Pemerintah Hindia Belanda tidak lepas dari penerapan konsep *colonial space*. *Colonial space* merujuk pada sistem pengorganisasian ruang yang terbentuk selama proses kolonisasi, di mana penggunaan dan representasi ruang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan pihak penjajah. Konsep ini diterapkan dengan tujuan menghapus makna-makna ruang yang sebelumnya diciptakan oleh masyarakat lokal, lalu menggantinya dengan tata ruang yang sesuai dengan preferensi dan kenyamanan penjajah (Noyes 2021). Hal tersebut dapat kita tinjau dari bangunan dan struktur penunjang kota.

Pertumbuhan Kota Payakumbuh pada masa Pemerintah Hindia Belanda dapat dilacak melalui dokumentasi historis yang mencerminkan transformasi sarana perkotaan dan kehidupan perkotaan antara tahun 1894 hingga 1930. Berdasarkan peta *Sumatra: A Phenomenon in 1891–1893*, pada tahun 1894 tercatat sedikitnya 15 sarana perkotaan yang telah terdokumentasi (Tabel 1). Hingga tahun 1930, jumlah ini meningkat menjadi 22 sarana, yang merefleksikan adanya dinamika pertumbuhan kota, baik dari segi sarana perkotaan, demografi, maupun aktivitas sosial-ekonomi.

Pertumbuhan sarana perkotaan di Payakumbuh pada masa Pemerintah Hindia Belanda tidak dapat dilepaskan dari peran strategis kota ini sebagai salah satu pusat ekonomi di Keresidenan Pantai Barat Sumatera. Sehingga, dibutuhkan tambahan sarana perkotaan untuk mendukung tujuan tersebut. Peran ini terlihat jelas melalui pembangunan Stasiun (SS) Pajakoemboeh, yang berfungsi sebagai moda transportasi utama bagi masyarakat serta distribusi hasil bumi dari *Afdeeling* Limapuluh Kota ke berbagai wilayah lain di keresidenan tersebut. Selain itu, Pasar Payakumbuh tercatat sebagai pasar tersibuk kedua setelah Pasar Bukittinggi, memperkuat posisi Payakumbuh sebagai pusat aktivitas ekonomi regional. Di luar aspek ekonomi, Payakumbuh juga berfungsi sebagai pusat administratif bagi *Afdeeling* Limapuluh Kota, sebagaimana dibuktikan dengan pembangunan berbagai kantor pemerintahan dan fasilitas komunikasi. Kuatnya pengaruh kolonial di wilayah ini juga tercermin dari relokasi rumah Asisten Residen, yang semula berada dalam kompleks benteng kolonial, ke kawasan yang lebih dekat dengan pusat kegiatan ekonomi kota. Perubahan lokasi tersebut dapat ditafsirkan sebagai simbol pergeseran strategi kolonial dari pendekatan yang bersifat defensif menuju ekspansi yang

lebih terbuka, menyatu dengan struktur perkotaan secara lebih menyeluruh. Hal ini juga membuat, Payakumbuh menjadi simbol dari keberhasilan Pemerintah Hindia Belanda menguasai wilayah dan masyarakat di *Afdeeling* Limapuluh Kota

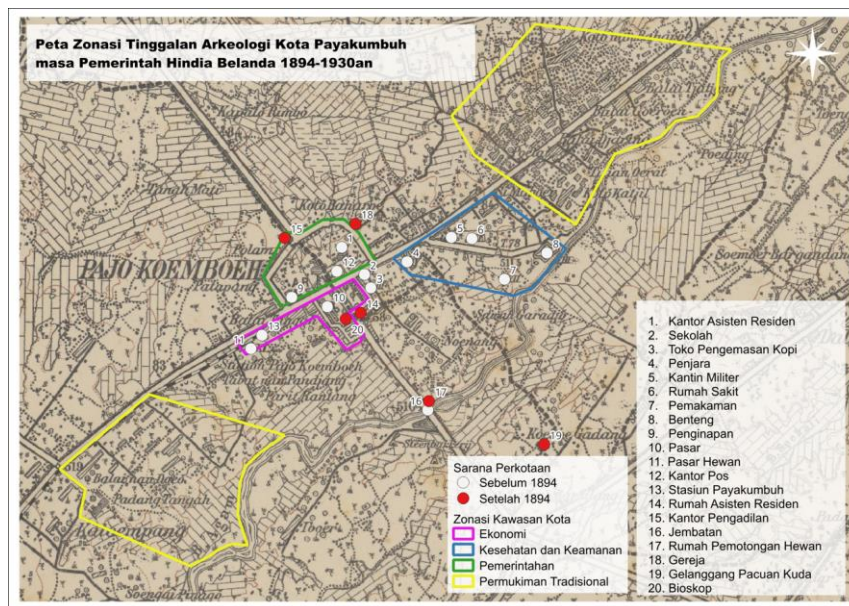
Kemajuan pembangunan ini juga memunculkan dinamika sosial baru di tengah masyarakat Payakumbuh. Salah satu indikatornya adalah bertambahnya keberagaman masyarakat, yang tercermin dari pendirian Gereja Protestan di wilayah ini. Keberadaan gereja tersebut menunjukkan bahwa komunitas Protestan mulai tumbuh di tengah masyarakat Payakumbuh yang mayoritas beragama Islam. Selain itu, hadirnya berbagai jenis sarana hiburan mencerminkan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat, yang ditandai dengan munculnya kebutuhan terhadap pemenuhan aspek-aspek tersier dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Payakumbuh menjadi mengenal olahan makanan eropa dengan keberadaan *toek roti bakeri*. Modernisasi juga tercermin dalam pola mobilitas penduduk. Sebelum masa kolonial, moda transportasi utama yang digunakan adalah bendi atau delman. Namun, seiring dengan masuknya pengaruh kolonial dan perkembangan sarana perkotaan, terjadi perubahan signifikan dengan hadirnya transportasi kereta api. Bahkan, kalangan elite lokal yang memiliki kekayaan dan pengaruh sosial-ekonomi mulai menggunakan mobil sebagai sarana transportasi pribadi.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, bentuk perkotaan Kota Payakumbuh pada masa Pemerintah Hindia Belanda dapat dibagi menjadi tiga zona utama (Gambar 8). Pertama, zona inti, yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan. Zona ini menjadi area paling sibuk dengan berbagai aktivitas administratif dan ekonomi. Kedua, zona penyangga, yang berada di luar zona inti. Zona ini mencakup fasilitas-fasilitas kota yang mendukung aktivitas di zona inti, seperti kesehatan dan keamanan. Ketiga, zona permukiman, yang menjadi tempat tinggal masyarakat lokal.

Zona pertama yaitu zona inti kota. Pusat Kota Payakumbuh berada pada persimpangan jalan utama yaitu Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Ahmad Yani. Zona inti kota ditandai dengan adanya konsentrasi bangunan bergaya kolonial. Di area ini, terdapat sejumlah bangunan penting, seperti kantor asisten residen, kantor pos, kantor pengadilan, penjara, gereja, dan sekolah, yang berfungsi sebagai pusat aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, dan pendidikan. Selain itu, terdapat pula beberapa rumah yang menampilkan arsitektur khas kolonial, menambah karakteristik unik dari zona inti kota. Pada area di inti kota, juga terdapat bangunan-bangunan yang difungsikan untuk

mendukung kegiatan ekonomi, seperti pasar. Sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, perkembangan dan pertumbuhan kota kolonial tidak lepas dari kontribusi masyarakat keturunan Cina. Di kota-kota kolonial Indonesia, kawasan pecinan kerap menjadi pusat aktivitas karena wilayah ini merupakan pusat perdagangan yang sibuk. Di Kota Payakumbuh, aktivitas ekonomi seperti kios pertokoan didominasi oleh masyarakat keturunan Cina. Selain itu, pada zona ini juga terdapat bioskop yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi setempat.

Di luar wilayah pusat kota, terdapat dua zona tambahan yang turut membentuk struktur spasial Payakumbuh pada masa kolonial. Zona kedua merupakan kawasan penyangga yang terletak di sekitar Jalan Ade Irma Suryani. Wilayah ini didominasi oleh fasilitas pelayanan publik, seperti rumah sakit dan kompleks pemakaman. Pada masa kolonial, zona ini juga memiliki fungsi militer dan sosial, yang ditandai oleh keberadaan benteng dan kantin militer yang digunakan oleh tentara Belanda, serta difungsikan sebagai area hunian dan tempat makan mereka. Sementara itu, zona ketiga mencakup kawasan permukiman masyarakat lokal yang berada di pinggiran kota. Permukiman tua yang mencerminkan pola hunian masyarakat setempat dapat ditemukan terutama di sisi timur pusat kota, seperti di daerah Koto Nan Gadang dan Koto Nan Ampek.



Gambar 8. Zonasi Area di Kota Payakumbuh (Sumber: Topographisch Bureau Batavia 1894, 1, diolah oleh Dwi Kurnia Sandy, 2024)

SIMPULAN

Payakumbuh sebagai sebuah wilayah dapat dikategorikan sebagai kota pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini berdasarkan adanya lima *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* dalam rentang 1863-1935 yang mengatur Payakumbuh. Bentuk Tata ruang Kota Payakumbuh hari ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Hindia Belanda yang menjadikannya sebagai kota administratif penting di *Afdeeling* Limapuluh Kota. Tata ruang kota yang dirancang pada masa kolonial masih menjadi dasar bagi pengembangan kota hingga saat ini, dengan hanya sedikit perubahan signifikan pada struktur keruangnya. Pemerintah Hindia Belanda terutama mengembangkan area inti kota untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan keamanan.

Kota Payakumbuh masa kini merupakan hasil dari proses perkembangan historis yang berlangsung sejak masa kolonial Hindia Belanda. Pada periode tersebut, Payakumbuh memainkan peran strategis sebagai pusat perekonomian di wilayah Keresidenan Pantai Barat Sumatera, sekaligus menjadi pusat pemerintahan bagi *Afdeeling* Limapuluh Kota. Dinamika urban yang berkembang selama masa pemerintahan kolonial tercermin dalam berbagai aspek, antara lain: pertumbuhan fisik kota yang selaras dengan peningkatan aktivitas ekonomi, munculnya keragaman sosial di tengah masyarakat, fungsi administratif kota sebagai perwujudan pengaruh politik kolonial, serta struktur tata ruang kota yang terbagi ke dalam tiga zona utama—yakni pusat kota, zona penyangga, dan kawasan permukiman tradisional. Keseluruhan proses ini membentuk fondasi identitas urban Payakumbuh yang dapat ditelusuri hingga masa kini.

Perubahan signifikan telah terjadi di Kota Payakumbuh saat ini, ditandai dengan hilangnya sejumlah bangunan kolonial serta terjadinya alih fungsi ruang untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan modern. Proses pembangunan kota kerap kali menimbulkan ketegangan antara tuntutan pembangunan dan upaya pelestarian tinggalan arkeologis. Dalam konteks inilah pendekatan Arkeologi Perkotaan menjadi sangat relevan. Pendekatan ini memungkinkan kota Payakumbuh untuk merefleksikan kembali sejarah perkembangannya serta mengidentifikasi elemen-elemen positif yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam struktur tata ruang kota. Dengan demikian, proses pembangunan yang berlangsung di Payakumbuh dapat mempertimbangkan terlebih dahulu keberadaan tinggalan arkeologis yang masih tersisa, serta memanfaatkannya sebagai bagian dari identitas kota. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi

bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah melalui sektor pariwisata berbasis warisan budaya. Penelitian lebih lanjut sangat dibutuhkan, khususnya terkait peran historis Payakumbuh sebagai pusat pemerintahan dan hubungannya dengan kota-kota lain di wilayah Keresidenan Pantai Barat Sumatra.

Perlu dicatat, jumlah sarana perkotaan yang tertulis di dalam tulisan ini masih dapat berubah. Berdasarkan catatan dokumen dari masa Pemerintah Hindia Belanda, diketahui bahwa di Kota Payakumbuh pernah berdiri beberapa institusi keuangan seperti bank perkreditan rakyat, bank konvensional, serta pegadaian. Namun, hingga tulisan ini disusun, belum ditemukan dokumentasi visual maupun data lokasi yang pasti mengenai keberadaan sarana-sarana perkotaan tersebut. Tidak tertutup kemungkinan bahwa masih terdapat lebih banyak lagi fasilitas perkotaan di Payakumbuh pada masa kolonial yang belum tercatat secara tertulis atau tidak memiliki dokumentasi foto yang tersimpan hingga saat ini. Kajian semacam ini dapat memperkaya pemahaman tentang sejarah kawasan serta mengungkap potensi Payakumbuh sebagai bagian dari jaringan kota kolonial di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asba, A. Rasyid. 2007. *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah : Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Asnan, Gusti. 2002. "Transportation on the west coast of Sumatra in the nineteenth century." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En* 158 (4): 727–41. <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/27867991>.
- Basundoro, Purnawan. 2016. *Pengantar Sejarah Kota*. 1 ed. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Bataviaasch nieuwsblad. 1886. "General Demmeni." *Bataviaasch nieuwsblad*, 14 Desember 1886. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110616951:mpeg21:a0004>.
- BPCB Sumatera Barat. 2018. "Deskripsi Cagar Budaya Tidak Bergerak Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat." Tanah Datar.
- Joustra, M. 1923. *Minangkabau Overzicht van Land, Geschiedenis en Volk*. 2 ed. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Marzuki, Irfanuddin Wahid. 2020. *Arkeologi Perkotaan Gorontalo : Perkembangan Kota dan Sebaran Bangunan Indis di Kota Lama Gorontalo*. 1 ed. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Noyes, John K. 2021. "Colonial Space." Dalam *Encyclopedia of African Religions and*

- Philosophy*, 133–34. Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-024-2068-5_83.
- Oprechte Haarlemsche Courant. 1887. “OOST-INDISCHE BERIGTEN.” *Oprechte Haarlemsche Courant*, 14 Januari 1887. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB12:000014011:mpeg21:p00001>.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2019. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Barat*. Indonesia.
- Pradnyawan, Dwi. 2019. “KOTA-KOTA EKS KERESIDENAN KEDU (KAJIAN MORFOLOGI KOTA BERSEJARAHH).” *Berkala Arkeologi* 39 (2): 159–82. <https://doi.org/10.30883/jba.v39i2.331>.
- Saibert, Violetta O. 2016. “Urban Archaeology: Problems, Methods, Results.” *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences* 9 (04): 971–77. <https://doi.org/10.17516/1997-1370-2016-9-4-971-977>.
- Schuiling, R. 1889. *Nederland Tusschen de Tropen Aardrijkskunde Onze Kononien in Oost en Wesy*. De Erven J. J. Tijl.
- Smith, Michael E. 2020. “Definitions and Comparisons in Urban Archaeology.” *Journal of Urban Archaeology* 1 (Januari):15–30. <https://doi.org/10.1484/J.JUA.5.120907>.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië. 1863. *Staatsblad van Nederlandsch-Indië over het Jaar 1863. LANDSDRUKKERIJ*. Nederlandsch-Indië: Delpher.nl. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB07:001257001:pdf>.
- . 1864. *Staatsblad van Nederlandsch-Indië over het Jaar 1864. LANDSDRUKKERIJ*. Nederlandsch-Indië: Delpher.nl. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB07:001259001:pdf>.
- . 1905. *Staatsblad van Nederlandsch-Indië over het Jaar 1905. LANDSDRUKKERIJ*. Nederlandsch-Indië: Delpher.nl. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB07:001311001:pdf>.
- . 1913. *Staatsblad van Nederlandsch-Indië over het Jaar 1913. LANDSDRUKKERIJ*. Nederlandsch-Indië o: Delpher.nl. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB07:001302001:pdf>.
- . 1935. *Staatsblad van Nederlandsch Indie over het Jaar 1935. LANDSDRUKKERIJ*. NEDERLANDSCH-INDIË: delpher.nl. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB07:001363001:pdf>.
- Sumatra-bode. 1913. “Burgerlijke openbare werken.” *Sumatra-bode*, 8 Oktober 1913. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:002098075:mpeg21:p00002>.
- . 1932. “PADANGSCHE KUNSTKRING Lezing over Hadramaut.” *Sumatra-bode*, 8 Agustus 1932. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:002101032:mpeg21:p00002>.

Topographisch Bureau Batavia. 1894. "Pajokoemboeh : opgenomen in 1891-1893 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1894." *Topographisch Bureau*. Batavia: Topographisch Bureau.

<https://www.oldmapsonline.org/en/maps/3ee508d9-9404-58cc-bddd-01a0d2362fb5?gid=f5e0057c-978b-54aa-bd3a-49878f3190cd#position=13.1561/-0.24752/100.64635/-0.07&year=1894>.

———. 1902. "[Fort de Kock]: opgenomen in 1889-1895 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1902." *Topographisch Bureau*. Batavia: Topographisch Bureau. <https://www.oldmapsonline.org/en/maps/35e4e754-fb44-5561-995a-0d22314955b3?gid=281964f7-3658-58a2-93a1-7de8f84b80dc#position=9.5856/-0.2042/100.5376/-0.05&year=1902>.

Wingen, N., Van. 1903. *Paardenfokkerij en Wedrennen Padangsche Bovenlanden*. Heirs B. van der Kamp. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFUBU02:000049767:00002>.